

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif*. (cetakan ke-1). Jakarta : PT. RajaGrafindo Perseda.
- Imron, Mashyuri. 2003. *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*. *Jurnal Masyarakat dan Budidaya*, Volume 5 No. 1
- Juliantara. 2006. *Pengertian Desentralisasi*. Jakarta
- Moleong. Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. (cetakan ke-30). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Primyastanto, Mimit. 2017. *Ilmu Kelautan Dan Perikanan*. Malang: Intrans Publishing
- Smith, B.C., (1985). *Desentralization: The Territorial Dimension of the State*, London: George Allen and Unwim.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soejono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung,
- W.J.S Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zastrow, Charles. 2000. Introduction to Social Work and Social Welfare. United States : Brooks Cole.

Peraturan Dinas:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 2004

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 2004

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 *Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna*. 2005.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang No.22 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2.

(<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Mei 2018 Pukul 21.11)

(<http://natunakab.go.id/lintasan-sejarah-kabupaten-natuna/> diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.30)